Tito Karnavian Minta Seluruh ASN Ubah Perilaku Setor Menyetor

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) membangun pola pikir dan budaya kerja untuk melayani public, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya ingin ada perubahan mind set (pola pikir) dan juga budaya di lingkungan Kemendagri dan BNPP. Ini kan juga arahan dari Bapak Presiden untuk melaksanakan revolusi mental," kata Tito kepada wartawan, Jumat (25/2).

Tito mengatakan upaya membangun pola kerja melayani publik itu berkaitan dengan nilai inti atau core values ASN "Ber-AKHLAK", Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja para ASN itu karena Kemendagri memiliki tugas mengurusi 548 pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, di tengah keterbukaan informasi, praktik-praktik pelayanan yang baik harus dijalankan termasuk sikap antikorupsi.

Apalagi, dengan penguatan peran masyarakat sipil dengan didukung keberadaan media sosial. Hal tersebut berdampak pada berbagai sektor, termasuk komplain masyarakat terhadap pelayanan publik, yang dapat langsung diketahui pimpinan termasuk Presiden.

"Kalau masih mempertahankan kultur-kultur buruk yang lama, setor menyetor, pungli dan segala macam nanti akan tergilas, tergilas, harus cepat berubah, beradaptasi pada lingkungan baru. Justru memanfaatkan teknologi itu untuk membuat image yang baik," katanya.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki kekuatan untuk mengontrol jalannya negara dengan sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia, katanya. Para ASN, harus dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja yang mengarah pada pelayanan masyarakat.

Salah satunya dengan mengubah sistem yang semakin terbuka dan transparan sehingga dapat lebih dipercaya publik. ● **mei**

FOTO/ANT

MENKO PMK TINJAU PENYALURAN BANSOS

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kedua kiri) menyerahkan kartu penyaluran dana bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada warga di Kantor Pos Desa Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (25/2). Menko PMK mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH tahap pertama harus selesai pada akhir Februari 2022, agar masyarakat kurang mampu segera menggunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kemenkumham Lakukan Persiapan Untuk Evakuasi WNI dari Ukraina

Salah satu langkah persiapan yang dilakukan Kemenkumham untuk mengevakuasi para WNI dari Ukraina, dengan mempermudah akses lalu lintas WNI di berbagai perbatasan internasional.

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyiapkan segala kemungkinan untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Ukraina. Persiapan itu dilakukan sejalan dengan situasi terkini konflik antara Rusia dengan Ukraina.

"Dalam fungsi Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, telah mempersiapkan diri menghadapi kontinjensi dalam rangka evakuasi WNI dari Ukraina," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto melalui keterangan resminya, Jumat (25/2).

Saat ini, terdapat sekira 140 WNI di Ukraina. Ratusan WNI tersebut dilaporkan dalam status aman. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memburuk dan mengancam keselamatan. Oleh karenanya, pemerintah menyiapkan kontinjensi untuk evakuasi WNI.

Salah satu langkah persiapan untuk mengevakuasi para WNI di Ukraina, kata Andap, dengan mempermudah akses lalu lintas WNI di berbagai perbatasan internasional. Hal itu sesuai dengan tugas dan fungsi dari Ditjen Keimigrasian Kemenkumham. Kemenkumham janji akan beri kemudahan bagi WNI yang akan keluar dari Ukraina.

"Kemenkumham berkomitmen memberikan dukungan kemudahan pelayanan selama perjalanan secara maksimal kepada para WNI yang terpaksa keluar dari Ukraina baik itu saat transit maupun saat tiba di tanah air," terangnya.

Sesuai tugas dan fungsinya, kementerian di bawah kepemimpinan Yasona H Laoly ini memiliki tugas menerbitkan dokumen perjalanan internasional.

Dalam kondisi normal, setiap orang diwajibkan untuk memiliki paspor. Namun dalam situasi kontinjensi, bisa saja paspor itu hilang ataupun rusak. Hal itu yang akan diurus oleh Ditjen Imigrasi.

"Dalam situasi kontinjensi, paspor bisa saja rusak, hilang, atau tertinggal karena kedaruratan. Dalam kondisi tersebut, Imigrasi nanti akan mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor," ucapnya.

Lebih lanjut, Andap menjelaskan bahwa SPLP hanya bisa berlaku untuk sekali jalan. Setelah kembali ke Indonesia, WNI pemegang SPLP harus mengurus kembali penggantian paspornya yang hilang atau rusak dalam keadaan kontinjensi.

SPLP ini sendiri, aturannya tertuang dalam UU No 6/2011 tentang Keimigrasian. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.

"Imigrasi Kemenkumham bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pengamanan blanko paspor di dalam dan luar Indonesia," beber Andap.

"Pada perwakilan Indonesia di Luar negeri yang tidak terdapat Atase atau Konsul Imigrasi, maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk," katanya. ● **han**

FOTO : ANT

AKSI MENOLAK PERANG RUSIA DAN UKRAINA

Warga melakukan aksi solidaritas dengan membawa poster hentikan perang di Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/2). Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas agresi militer Rusia terhadap Ukraina yang dinilai hanya akan menyengsarakan rakyat terutama anak-anak.

MAKI Sayangkan Langkah KPK Tak Banding di Kasus Azis Syamsuddin

JAKARTA (IM) - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak mengajukan banding atas vonis 3,5 tahun penjara terhadap mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Boyamin berpendapat, seharusnya KPK melakukan banding atas vonis tersebut karena Azis Syamsuddin dinyatakan merusak citra DPR. Apalagi, posisi Azis berada di Komisi III yang membidangi hukum.

"Mestinya KPK ajukan banding, karena apa? Rasa keadilan itu rasanya belum terpenuhi karena apapun mestinya ini kan 5 tahun maksimal," ujar Boyamin, Jumat (25/2).

"Azis Syamsuddin posisinya (mantan Wakil Ketua) DPR yang harusnya memberi contoh yang baik, dan dari sisi kacamata hukum juga beliau pernah duduk di Komisi III DPR," ujarnya.

Boyamin menilai, posisi Azis yang memahami hukum dan malah terjerat kasus korupsi seharusnya menjadi pemberat vonis terhadap eks Wakil Ketua DPR itu. Meskipun, politisi Golkar itu sebelumnya tidak pernah menjalani pidana karena kasus hukum.

"Jadi mestinya faktor pemberatnya itu banyak dan faktor meringankan tidak cukup mengurangi, meskipun ya belum pernah dihukum atau masih muda, ya tapi karena ancaman pemberi itu kan hanya 5 tahun," ucap Boyamin.

"Jadi ya ini mestinya dimaksimalkan dengan cara KPK mengajukan banding," ujarnya.

Kendati demikian, MAKI tetap menghormati keputusan KPK yang tidak mengajukan banding atas vonis Azis Syamsuddin itu. ● **han**

KPK Telisik Peran Rahmat Effendi dalam Pengadaan Polder Kota Bintang Bekasi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik adanya campur tangan Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi (RE), dalam pengadaan polder perumahan atau kawasan Kota Bintang Bekasi. KPK menduga ada korupsi dalam pengadaan polder tersebut.

Peran aktif atau andil Rahmat Effendi untuk pengadaan polder Kota Bintang itu ditelisik KPK lewat saksi Bagus Kuncoro Jati alias Dimas. Dimas merupakan mantan ajudan Rahmat Effendi. Dia diduga mengetahui dugaan campur tangan Rahmat Effendi dalam pengadaan polder Kota Bintang.

"Bagus Kuncoro Jati alias Dimas (ajudan Wali Kota Bekasi), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya campur tangan tersangka RE untuk pengadaan polder Kota Bintang, Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (25/2).

Satu saksi lainnya dari pihak swasta, Rachmat Utama Djangkar, yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis, 24 Februari 2022, kemarin, mangkir alias tidak memenuhi panggilan KPK. KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Rachmat.

"Rachmat Utama Djangkar (Swasta/ PT. Deka Sari Perkasa), tidak hadir dan mengonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.

Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap. Mereka adalah Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi diduga menerima uang total Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung tekhnis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus 'Sumbangan Masjid'. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. ● **han**

KPK Usut Aliran Suap Eks Wali Kota Tasikmalaya

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, sebagai saksi. Budi diperiksa terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi khusus (DAK) tahun 2018.

Penyidik KPK menggali informasi terkait aliran uang dugaan suap dari Budi Budiman untuk sejumlah pihak. Diduga, sejumlah pejabat negara yang ikut menikmati uang panas korupsi pengurusan DAK tahun 2018.

"Saksi Budi Budiman dikonfirmasi antara lain perihal terkait awal mula perkenalan saksi dengan pihak-pihak terkait dengan perkara ini. Di samping itu didalami mengenai adanya dugaan penyerahan uang dari saksi dalam rangka pengurusan DAK 2018 dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (25/2).

Sebagaimana diketahui, Budi Budiman pernah dijerat KPK sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan DAK Kota Tasikmalaya tahun 2018 pada April 2020. Budiman telah dinyatakan bersalah atas kasusnya.

Budiman terbukti melakukan tindak pidana korupsi yakni menyuap pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo sebesar Rp400 juta. Uang itu dimaksudkan untuk memuluskan DAK Tasikmalaya tahun 2018. Diduga, tak hanya Yaya Purnomo selaku pejabat Kemenkeu yang menerima aliran uang dari Budiman.

KPK sedang menyidik kembali pihak-pihak yang turut menerima uang suap terkait pengurusan DAK tahun 2018. Bahkan, sudah ada tersangka baru dalam pengembangan perkara ini. Sayangnya, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa tersangka baru itu.

"Benar KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan atas dugaan korupsi pengurusan dana DAK 2018. Konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan setelah penyidikan cukup," ucap Ali.

Selain Budiman, KPK telah menjerat sejumlah pihak lain dalam perkara korupsi pengurusan DAK tahun 2017-2018 ini. Mereka adalah, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono; eks Pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Sukiman.

Kemudian, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua, Natan Pasomba; Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah alias Buyung; mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono, dan Anggota DPR RI periode 2014-2019, Irgan Chairul Mahfiz. ● **mei**

Berkas Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Dinyatakan Lengkap

JAKARTA (IM) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi (EM) sudah lengkap atau P-21. Berkas sudah dikirimkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Kamis (24/2) kemarin.

"Berkas perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian atas nama tersangka EM telah lengkap secara formil dan materiil (P-21)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2).

Menurut Leonard, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga meminta kepada penyidik Dittipidsiber Bareskrim untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Hal itu diperlukan untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Diketahui, Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bareskrim Polri pada Senin (31/1). Saat itu polisi langsung menahan Edy. Pelaporan terhadap Edy ini buntut dari pernyataan Edy saat mengkritik lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

Pernyataan itu berkaitan dengan kritikan Edy yang menolak perpindahan IKN ke Kalimantan Timur dengan menyebutkan istilah "tempat jin buang anak". Dalam video yang beredar Edy Mulyadi mengkritik bahwa lahan ibu kota negara (IKN) baru tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi. ● **mei**

FOTO : ANT

PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH DI SEMARANG

Warga menerima sertifikat tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bendan Ngisor, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/2). Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menggenjot pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat melalui Program PTSL agar pada tahun 2025 mendatang target pendaftaran 126 juta bidang tanah dapat tercapai sebagai upaya memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada warga atas tanah yang dimiliki. IDN/ANTARA

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Berdasarkan Akta No.09 tanggal 25 Februari 2022 dibuat dihadapan Heri Martono, SH., Notaris di Bekasi, PT. DONGSUNG JASA INDONESIA dibubarkan sejak tanggal 25 Februari 2022. Para kreditur Perseroan yang memiliki tagihan terahadap Perseroan dapt mengajukan tagihannya (didukung dengan bukti dan dokumen yang relevan) kepada Likuidator pada alamat : Gandaria 8 Office Tower Lt.6 Unit I, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 25 Februari 2022
LIKUIDATOR PT DONGSUNG JASA INDONESIA
(DALAM LIKUIDASI)